

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Provinsi Jambi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan kinerja, karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Berikut identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jambi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Eksekutif	Jumlah Ranperda yang di bahas dan ditetapkan	Fasilitasi DPRD untuk melakukan pembahasan Ranperda Eksekutif	Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD	Belum efektifnya peraturan perundang-undangan
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses	Fasilitasi bagi DPRD untuk melakukan reses	Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaring asmara secara dinamis dan demokratis	Belum optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat

Terlaksananya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Kunjuran dan Peninjauan Lapangan	Memfasilitasi kunjungan kerja DPRD	Tingginya standart pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD	Keterbatasan sarana dan prasarana.
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Bimtek yang diikuti	Memfasilitasi DPRD melaksanakan Studi Banding	Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tupoksi	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi Sekretariat Dewan
Pembahasan Ranperda Legislatif	Jumlah Raperda yang dibahas dan ditetapkan	Fasilitasi DPRD untuk melakukan pembahasan Ranperda Legislatif	Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD	Belum efektifnya peraturan perundang-undangan
Publikasi Rapat Paripurna DPRD	Jumlah Rapat Paripurna yang di publikasi	Memfasilitasi Publikasi Rapat DPRD	Kebutuhan Masyarakat dalam pemberian informasi sebagai bentuk transparansi	Tingkat kedisiplinan anggota dalam menghadiri sidang / rapat rendah.
Optimalisasi Pelayanan Keprotokolan, Informasi, Komunikasi, Kehumasan Bagi Pimpinan DPRD	Jumlah pelayanan terhadap kegiatan DPRD	Memfasilitasi kegiatan keprotokolan, informasi, komunikasi, kehumasan, bagi pimpinan DPRD	Standar pelayanan keprotokolan yang terlalu tinggi.	Keterbatasan sarana dan prasarana.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jambi diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Provinsi Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, yaitu :

Visi :

“Provinsi Jambi Yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021” dan untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang akan ditempuh, antara lain sebagai berikut :

Misi :

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.

- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
- 3) Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat.
- 4) Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
- 5) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, maka Sekretariat DPRD Provinsi Jambi masuk pada misi pertama, ketiga dan misi keempat yaitu :

- ***Misi (1) :***

"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik. "

- ***Misi (3) :***

"Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat"

- ***Misi (4) :***

"Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan."

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan tata kelola Pemerintahan Daerah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada peningkatan kualitas, kompetensi dan kinerja aparatur pemerintah daerah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, penyediaan produk hukum daerah yang mengakomodir kebutuhan daerah, serta peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan publik.

Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Provinsi Jambi Yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, Transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Belum Optimalnya Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kurangnya pemahaman aparatur	Komitmen pimpinan untuk memberikan arahan dan bimbingan
2	Misi 3 : Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Belum Optimalnya DPRD dalam melaksanakan Tupoksi	Tumpang tindihnya kepentingan antar fraksi	Terfasilitasinya sarana dan prasarana kebutuhan DPRD

3	Misi 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan		
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terbatasnya Kemampuan teknis SDM aparatur	Jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi terbatas Komitmen pimpinan untuk menambah jumlah SDM serta memenuhi kualifikasi baik melalui pendidikan maupun Pelatihan

Untuk mencapai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2016 – 2021, yakni Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 (JAMBI TUNTAS 2021) Sekretariat DPRD Provinsi terkait pada Misi pertama, Misi Ketiga, dan Misi Keempat yaitu,:

- 1) Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik;
- 2) Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat;
- 3) Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai hal tersebut di atas ada 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

Sedangkan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
- 2) Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.
- 3) Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga social kemasyarakatan lainnya termasuk LMS.
- 4) Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD.
- 5) Masih rendahnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- 6) Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan parasarana serta pengembangan kelembagaan kesekretariatan DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh.
- 7) Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya.
- 8) Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
- 9) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
- 10) Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior.
- 11) Peningkatan hubungan yang hamonis dengan DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara dinamis dan demokratis.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga.

Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sebagai unit penunjang dan pelayanan administratif maka sasaran program yang tertuang dalam Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi dapat terlaksana dengan baik dan saling melengkapi satu sama yang lain. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Kota / Kabupaten tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi dalam bidang perencanaan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Sekretariat DPRD menjalankan tugas dalam bidang Pemerintahan Umum yang lebih khusus mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Dengan kewenangan tersebut, maka penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah yang mencakup proses perencanaan dilakukan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota). Dikarenakan Sekretariat DPRD bukan merupakan lembaga teknis daerah, maka sasaran jangka menengah dari rencana strategis kementerian dan kota / kabupaten tidak secara langsung berkaitan. Masing-masing lembaga perencana baik ditingkat pusat maupun kota / kabupaten melakukan perencanaan pembangunan di lingkup kewenangannya masing-masing, namun harus sesuai dengan prinsip perencanaan karena merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengingat tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sebagai unit penunjang dan pelayanan administratif maka sasaran program yang tertuang dalam Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi dapat terlaksana dengan baik dan saling melengkapi satu sama yang lain.

Telaah RTRW Provinsi Jambi dimaksudkan sebagai identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi ditinjau dari implikasi RTRW. Mengingat tupoksi Sekretariat DPRD memiliki tugas utama terkait dengan tugas menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi RTRW.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk menentukan isu strategis mana yang paling berpengaruh terhadap pelayanan Sekretariat DPRD maka perlu dilakukan penentuan skor untuk masing-masing isu strategis tersebut. Skor kriteria untuk penentuan isu-isu strategis ditentukan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
TOTAL		100

Berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis di atas maka dapat dihitung total skor untuk masing-masing isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Niai Skala Kriteria Ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.	20	10	10	10	10	10	70
2.	Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.	20	15	15	20	15	15	100
3.	Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah	15	15	15	10	15	15	85
4.	Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik	20	15	10	10	15	15	85
5.	Manajemen Keuangan dan Aset Daerah	10	10	20	10	15	15	80

Ada 5 (lima) buah isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jambi selama kurun waktu Tahun 2016-2021. Untuk menentukan isu strategis mana yang paling berpengaruh terhadap pencapaian visi misi Sekretariat DPRD serta untuk menunjang RPJMD Provinsi Jambi, Renstra dan Renstra Kabupaten/Kota maka dilakukan skala untuk masing-masing isu strategis tersebut.

Tabel 3.5
Rata-rata Skor Isu-isu Strategis

No	Isu-isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1.	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.	70	14
2.	Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.	100	20
3.	Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah	85	17
4.	Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik	85	17
5.	Manajemen Keuangan dan Aset Daerah	80	16

Dari isu-isu strategis tersebut, yang memiliki peran paling besar terhadap pencapaian tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi antara lain adalah :

- 1) Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- 2) Pendayagunaan Sumberdaya Aparatur.
- 3) Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik.
- 4) Manajemen Keuangan dan Aset Daerah
- 5) Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi